

PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MELALUI LAW STUDENT VILLAGE PROJECT (LSVP)

Rianda Dirkareshza, Suherman, Taupiqurrahman, Rosalia Dika Agustanti,
Samuel Arthur Hulu.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, DKI. Jakarta, Indonesia

Corresponding author : Rosalia Dika Agustanti
E-mail : rosaliadika@upnvj.ac.id

Diterima 30 Oktober 2023, Direvisi 09 Desember 2023, Disetujui 09 Desember 2023

ABSTRAK

Law Student Village Project (LSVP) merupakan proyek pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dalam proyek ini, pendampingan hukum diberikan kepada pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Puraseda untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi khususnya terkait dengan legalitas usaha. Tujuan LSVP adalah meningkatkan pemahaman, pemberdayaan, dan pendampingan hukum bagi UMKM. Metode yang digunakan adalah *Case Based Participatory Research (CBPR)* dengan kolaborasi antara mahasiswa, dosen hukum, dan pemilik UMKM dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah hukum yang terjadi di wilayah Desa Puraseda. Hasil dari pendampingan ini meliputi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Badan Hukum Perorangan, serta peningkatan pemahaman hukum UMKM mengenai regulasi bisnis, perlindungan merek dagang, perselisihan kontrak, dan hak kekayaan intelektual. Dalam kesimpulannya, LSVP berhasil memberikan menghasilkan sertifikat NIB, akta pendirian badan hukum perorangan dan pendampingan hukum yang efektif serta memberdayakan UMKM dalam menjalankan bisnis secara legal.

Kata kunci: pemberdayaan hukum; usaha mikro kecil menengah; kolaborasi.

ABSTRACT

Law Student Village Project (LSVP) is a community service project carried out by law students and lecturers from the Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. In this project, legal assistance is provided to the owners of Usaha Mikro Kecil Menengah (MSMEs) in Puraseda Village to overcome legal problems faced, especially related to business legality. The purpose of LSVP is to increase understanding, empowerment, and legal assistance for MSMEs. The method used is *Case Based Participatory Research (CBPR)* with collaboration between students, law lecturers, and MSME owners in identifying, analyzing, and solving legal problems that occur in the Puraseda Village area. The results of this assistance include registration of Business Identification Number (NIB) and Individual Legal Entity, as well as increasing MSME legal understanding regarding business regulations, trademark protection, contract disputes, and intellectual property rights. In conclusion, LSVP succeeded in producing NIB certificates, individual legal entity establishment deeds and effective legal assistance as well as empowering MSMEs in conducting business legally.

Keywords: legal counseling; intellectual property rights; complete systematic land registration.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat signifikan dalam menggerakkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan (Dirkareshza, Tarina, et al., 2021). Namun, UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk rendahnya pendapatan, keterbatasan akses ke pasar, dan

minimnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh pelaku UMKM (Dirkareshza, Azura, et al., 2021). Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan pendapatan UMKM dan memperkuat pemahaman hukum masyarakat Desa Puraseda. Pada konteks ini, *Law Student Village Project (LSVP)* hadir sebagai program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM melalui pendekatan hukum. LSVP adalah program

tahunan yang melibatkan dosen dan mahasiswa di bidang hukum untuk memberikan pendidikan dan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya UMKM. Program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan UMKM dan memperkuat kapasitas hukum masyarakat Desa Puraseda.

UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan peningkatan pendapatan (Safitri, 2020). Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman hukum dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Kaihatu, 2006). Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam berusaha. Hal ini membuat mereka rentan terhadap pelanggaran hukum, seperti pemalsuan merek dagang, perselisihan kontrak, atau penyalahgunaan hak kekayaan intelektual (Soemarsono & Dirkareshza, 2021). Selain itu, keterbatasan akses ke pasar dan permodalan juga menjadi kendala yang dihadapi oleh UMKM. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan memasarkan produk mereka dan mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas. Kurangnya keterampilan dalam pemasaran dan manajemen bisnis juga menjadi kendala dalam mengembangkan usaha. Selain itu, UMKM juga sering menghadapi keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha masyarakat Desa Puraseda, terutama dalam hal investasi, pengembangan produk, dan perluasan jaringan distribusi.

Pemberdayaan hukum memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Dengan memahami hak-hak dan kewajiban UMKM dalam berusaha, pelaku UMKM dapat melindungi diri mereka dari pelanggaran hukum dan mengoptimalkan potensi bisnis mereka. Pemahaman hukum yang baik juga dapat membantu UMKM dalam melakukan perjanjian bisnis, melindungi merek dagang para pengusaha UMKM, dan mengelola hak kekayaan intelektual dengan baik. Untuk dapat menjalankan seluruh peningkatan tersebut UMKM seharusnya memiliki legalitas, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Ciptaker) dapat memberikan perlindungan hukum melalui badan hukum perorangan. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya legalitas badan hukum perorangan juga dapat membantu UMKM dalam mengatasi kendala akses ke pasar dan permodalan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan regulasi yang berlaku, pelaku UMKM dapat

meningkatkan akses mereka ke pasar yang lebih luas. Masyarakat Desa Puraseda selaku pemilik UMKM juga dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada, seperti kebijakan Kredit Usaha Rakyat atau program dukungan pemerintah lainnya dalam pengembangan usaha.

Dalam konteks ini, LSVP hadir sebagai solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk memberdayakan UMKM melalui pendekatan hukum. Dalam program ini, mahasiswa dan dosen hukum bekerja sama dengan pelaku UMKM untuk memberikan penyuluhan, pendampingan, dan bantuan hukum yang spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui pendekatan ini, UMKM dapat memperoleh pemahaman hukum yang lebih baik, meningkatkan keterampilan manajerial dan pemasaran, serta memperoleh akses ke jaringan yang lebih luas. Tujuan utama dari LSVP adalah meningkatkan pendapatan UMKM melalui pemberdayaan hukum. Melalui program ini, diharapkan UMKM dapat memberikan legalitas agar dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha, memahami hak dan kewajiban hukum, serta memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan bisnis mereka (Melina & Taufiqurahman, 2022). Dengan demikian, diharapkan pendapatan UMKM dapat meningkat secara signifikan, sehingga berdampak positif pada kesejahteraan pelaku UMKM dan perekonomian secara keseluruhan.

Berkaitan dengan hal tersebut, LSVP juga memberikan manfaat bagi mahasiswa dan dosen hukum yang terlibat dalam program ini. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan praktis dalam mengimplementasikan ilmu hukum, memahami tantangan yang dihadapi oleh UMKM, dan belajar tentang isu-isu hukum terkait UMKM. Dosen hukum juga dapat memperluas jaringan kerja mereka, mengaplikasikan pengetahuan hukum dalam konteks nyata, dan berkontribusi dalam pengembangan masyarakat melalui pendidikan dan bantuan hukum. LSVP dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan pendapatan UMKM dan memberikan legalitas kepada mereka. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti mahasiswa, dosen, pemerintah, dan pelaku UMKM, program ini memiliki potensi untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam *Law Student Village Project (LSVP)* adalah

Case Based Participatory Research (CBPR) (Gu et al., 2021). CBPR merupakan pendekatan penelitian partisipatif yang melibatkan studi kasus nyata dalam konteks Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam implementasi LSVP, mahasiswa dan dosen hukum bekerja sama dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah hukum yang dihadapi oleh UMKM.

Pendekatan CBPR menekankan pada kolaborasi antara para peneliti dan pelaku UMKM dalam mengidentifikasi kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan hukum (Ward et al., 2018). Melalui kerjasama ini, peneliti dapat memahami dengan lebih baik tantangan dan kebutuhan hukum yang dihadapi oleh pelaku UMKM (Israel et al., 2017). Studi kasus ini mencakup berbagai aspek hukum yang relevan dengan UMKM, seperti regulasi bisnis, perlindungan merek dagang, perselisihan kontrak, atau hak kekayaan intelektual.

Dalam proses CBPR, peneliti melibatkan pemilik UMKM dalam analisis kasus yang diidentifikasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konteks bisnis dan hukum yang terkait dengan masalah yang dihadapi oleh UMKM. Melalui partisipasi aktif pemilik UMKM, peneliti dapat memperoleh perspektif praktis dan pengalaman yang berharga dalam menghadapi permasalahan hukum yang spesifik (Collins et al., 2018).

Setelah analisis dilakukan, peneliti bersama pemilik UMKM merancang solusi yang sesuai untuk setiap kasus. Solusi ini dapat berupa saran hukum, informasi tentang langkah-langkah yang dapat diambil, atau arahan untuk menghubungi lembaga atau ahli hukum yang dapat memberikan bantuan. Tujuan dari proses ini adalah memberikan solusi yang praktis dan relevan, serta meningkatkan pemahaman pemilik UMKM tentang hak-hak dan kewajiban hukum yang dimiliki (Balasubramanian, 2022).

Dalam konteks LSVP, pendekatan CBPR memberikan nilai tambah dan kebaruan pada pengabdian kepada masyarakat ini. Dengan melibatkan mahasiswa dan dosen hukum dalam kolaborasi dengan pelaku UMKM, metode ini memungkinkan peneliti untuk menjalankan pendekatan partisipatif yang lebih holistik. Hal ini tidak hanya memberikan solusi hukum, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum dalam masyarakat UMKM. Seperti yang diungkapkan oleh Israel dan Schulz dalam penelitian tentang CBPR, "pendekatan partisipatif ini dapat memperkuat kekuatan masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan" (Ward et al.,

2018)(Mabetha et al., 2023). Melalui penerapan metode CBPR, LSVP mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat pemberdayaan hukum dalam UMKM dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Puraseda. Dengan memahami masalah hukum yang dihadapi oleh UMKM dan melibatkan masyarakat Desa Puraseda dalam proses pengabdian kepada masyarakat, LSVP dapat memberikan solusi yang tepat dan relevan, serta mendorong pelaku UMKM untuk mengambil tindakan yang sesuai dan memanfaatkan sumber daya hukum yang tersedia.

Metode CBPR dalam LSVP juga memberikan kebaruan dalam pendekatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam banyak kasus, pendekatan pengabdian kepada masyarakat cenderung memberikan solusi yang datang dari luar tanpa melibatkan pihak yang terlibat secara langsung. Namun, dengan menerapkan CBPR, LSVP memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memiliki peran aktif dalam mengidentifikasi masalah hukum yang dihadapi dan merancang solusi yang tepat. Dalam hal ini, partisipasi pelaku UMKM bukan hanya sebagai objek penelitian, tetapi sebagai subjek yang memiliki pengetahuan dan pengalaman unik dalam konteks bisnis masyarakat Desa Puraseda.

Selain itu, penggunaan metode CBPR dalam LSVP juga dapat memberikan nilai tambah dalam hal keterlibatan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam proses CBPR, mahasiswa dan dosen hukum dapat berkolaborasi dengan instansi pemerintah terkait, seperti pendaftaran Nomor Induk Berusaha dan lembaga yang bertanggung jawab atas Badan Hukum Perorangan. Kolaborasi ini memungkinkan transfer pengetahuan dan sumber daya yang lebih luas, serta memperluas dampak dari program LSVP.

Dalam sebuah penelitian oleh Cornwall dan Jewkes, CBPR juga dianggap dapat meningkatkan kesadaran dan perubahan sosial dalam komunitas. Selanjutnya, penggunaan metode CBPR dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum dalam masyarakat UMKM (Cornwall & Jewkes, 1995). Pelaku UMKM yang terlibat dalam proses penelitian dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif tidak hanya pada bisnis mereka sendiri, tetapi juga pada masyarakat sekitarnya.

Dengan demikian, penggunaan metode CBPR dalam LSVP memberikan pendekatan yang inovatif dan efektif dalam pemberdayaan hukum dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah. Metode ini melibatkan kolaborasi antara mahasiswa, dosen, pelaku

UMKM, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah hukum yang dihadapi oleh UMKM. Melalui partisipasi aktif pelaku UMKM dan keterlibatan pemangku kepentingan yang relevan, LSVP dapat memberikan solusi yang praktis dan relevan, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum dalam masyarakat UMKM secara luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha UMKM

Pembahasan ini akan mencakup proses pendampingan pendaftaran NIB yang dilaksanakan pada lokasi Desa Puraseda, Kabupaten Bogor, kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam proses pendaftaran, serta peran mahasiswa dan dosen hukum dalam memberikan pendampingan. Selain itu, juga akan dijelaskan tentang manfaat memiliki NIB dan dampak positif dari pendampingan pendaftaran NIB dalam meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengakses fasilitas dan dukungan pemerintah.

Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu langkah penting dalam menjalankan UMKM (Andriani, 2022). NIB adalah identitas resmi yang diperlukan untuk memperoleh pengakuan hukum dan menjalankan bisnis secara legal (Noraga et al., 2023). Namun, banyak UMKM yang menghadapi kendala dalam proses pendaftaran NIB, baik karena kurangnya pemahaman tentang persyaratan yang harus dipenuhi maupun hambatan birokrasi yang kompleks. Melalui LSVP mahasiswa dan dosen hukum bekerja sama dengan pelaku UMKM untuk melaksanakan pendampingan dalam proses pendaftaran NIB. Pendampingan ini dilakukan dengan tujuan membantu UMKM agar dapat memenuhi persyaratan pendaftaran NIB secara lengkap dan tepat waktu, serta memahami prosedur yang harus diikuti.

Peran mahasiswa dan dosen hukum dalam pendampingan pendaftaran NIB sangat penting. Seluruh tim berfungsi sebagai fasilitator yang membantu UMKM dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP pemilik usaha, surat izin usaha, dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, Tim juga memberikan arahan yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari kesalahan administratif yang dapat memperlambat proses pendaftaran. Pendampingan pendaftaran NIB juga melibatkan kerjasama dengan pihak terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)

atau Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPST) (Hidayah et al., 2023). Mahasiswa dan dosen hukum dapat membantu UMKM dalam berinteraksi dengan instansi ini, termasuk dalam mengurus dan mempercepat proses pendaftaran.



Gambar 1. Pelaksanaan Pendampingan dan Pelatihan di Desa Puraseda



Gambar 2. Hasil Pendaftaran NIB di Desa Puraseda

Selain membantu dalam aspek administratif, pendampingan pendaftaran NIB juga mencakup edukasi kepada UMKM mengenai manfaat memiliki NIB. Dengan

memiliki NIB, UMKM dapat mengakses berbagai fasilitas dan dukungan dari pemerintah, seperti program pelatihan, akses ke pembiayaan, dan peluang kerjasama dengan perusahaan lain (Marthalina & Khairina, 2022). Melalui pendampingan ini, UMKM dapat lebih memahami potensi manfaat yang dapat diperoleh dengan memiliki identitas bisnis yang resmi.

Pendampingan pendaftaran NIB oleh mahasiswa dan dosen hukum akan memberikan dampak yang positif bagi UMKM. Dengan adanya pendampingan, UMKM akan lebih mudah dan efisien dalam proses pendaftaran NIB, sehingga dapat menghindari kesalahan atau kelalaian yang dapat memperlambat proses tersebut. Selain itu, UMKM juga akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memiliki NIB dan manfaat yang dapat diperoleh darinya.

Pendampingan pendaftaran NIB juga akan membantu UMKM dalam mengatasi kendala administratif yang seringkali menjadi hambatan dalam proses pendaftaran. Dengan bantuan mahasiswa dan dosen hukum, UMKM dapat memperoleh informasi yang akurat dan tepat mengenai persyaratan pendaftaran NIB. Hal ini akan membantu UMKM dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pendampingan pendaftaran NIB juga akan meningkatkan kemampuan UMKM dalam berinteraksi dengan pihak terkait, seperti DPMPSTSP atau BPMPT. Mahasiswa dan dosen hukum akan membantu UMKM dalam berkomunikasi dan mengurus proses pendaftaran dengan instansi-instansi terkait (DWI SAFITRI et al., 2023). Hal ini akan mempercepat proses pendaftaran dan mengurangi potensi kesalahan atau kebingungan dalam menghadapi birokrasi.

Dalam hal ini, penting juga untuk mencatat bahwa pendampingan pendaftaran NIB tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi UMKM, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap perekonomian. Dengan memudahkan proses pendaftaran dan meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki NIB, pendampingan ini akan memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM yang memiliki NIB juga akan lebih mudah mendapatkan akses ke berbagai program dan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mendukung perkembangan UMKM. Untuk menghasilkan pendampingan pendaftaran NIB yang efektif, perlu adanya sinergi antara perguruan tinggi, UMKM, dan pemerintah. Melalui kerjasama yang baik, perguruan tinggi dapat mengembangkan

program pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. UMKM dapat berperan aktif dalam menyampaikan masalah dan kendala yang masyarakat Desa Puraseda hadapi dalam proses pendaftaran NIB, sementara pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan akses yang lebih mudah ke instansi terkait.

Pendampingan pendaftaran NIB untuk UMKM juga dapat menjadi subjek penelitian dan studi lebih lanjut dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang tantangan dan solusi dalam proses pendaftaran NIB. Studi komparatif antara daerah atau negara-negara lain yang telah berhasil melaksanakan pendampingan pendaftaran NIB juga dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pengembangan pendekatan terbaik.

Pendampingan Pendaftaran Badan Hukum Perorangan

Pendaftaran Badan Hukum Perorangan merupakan langkah penting bagi UMKM yang ingin mengembangkan bisnis masyarakat Desa Puraseda secara legal dan terjamin (Jap, 2018). Namun, banyak UMKM yang masih kurang memahami proses pendaftaran Badan Hukum Perorangan dan menghadapi kendala administratif serta hambatan birokrasi (Harahap et al., 2021). Dalam LSVP, mahasiswa dan dosen hukum berperan dalam memberikan pendampingan dalam proses pendaftaran Badan Hukum Perorangan bagi UMKM. Pendampingan ini meliputi penjelasan mengenai persyaratan pendaftaran, bantuan dalam pengisian formulir, dan pemahaman tentang prosedur yang harus diikuti.

Pada awalnya, pendampingan pendaftaran Badan Hukum Perorangan dimulai dengan pembahasan mengenai jenis badan hukum yang sesuai dengan UMKM tersebut, seperti perusahaan perseorangan atau koperasi. Mahasiswa dan dosen hukum membantu UMKM dalam memahami perbedaan antara jenis badan hukum tersebut serta keuntungan dan keterbatasan masing-masing. Setelah memilih jenis badan hukum yang sesuai, mahasiswa dan dosen hukum memberikan panduan tentang persyaratan pendaftaran Badan Hukum Perorangan. Hal ini meliputi pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti akta pendirian, identitas pemilik usaha, dan surat izin usaha. Pendampingan ini juga mencakup bantuan dalam mengisi formulir pendaftaran dan memastikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

UMKM memahami dan memenuhi kewajiban hukum yang relevan dengan status badan hukum mereka.

Selama proses pendampingan, mahasiswa dan dosen hukum juga memberikan nasihat dan arahan terkait manajemen bisnis bagi UMKM yang telah memiliki badan hukum. Seluruh tim membantu UMKM memahami pentingnya mengelola keuangan secara tertib, memiliki sistem pencatatan yang baik, dan mematuhi prinsip-prinsip bisnis yang berlaku. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu UMKM dalam menjalankan bisnis dengan lebih profesional dan mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari memiliki badan hukum.

Melalui pendampingan pendaftaran Badan Hukum Perorangan, LSVP memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat pemberdayaan hukum UMKM. Mahasiswa dan dosen hukum berperan sebagai fasilitator yang membantu UMKM mengatasi kendala administratif dan hambatan birokrasi dalam proses pendaftaran. Seluruh tim juga memberikan pemahaman dan edukasi tentang manfaat dan kewajiban yang terkait dengan memiliki badan hukum.

Pendampingan ini tidak hanya memberikan solusi praktis bagi UMKM dalam mengurus pendaftaran Badan Hukum Perorangan, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas. Dengan memiliki badan hukum yang resmi, UMKM dapat memperoleh kepastian hukum, meningkatkan reputasi bisnis, dan mendapatkan akses yang lebih baik ke berbagai peluang dan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah dan sektor swasta. Pendampingan pendaftaran Badan Hukum Perorangan dalam LSVP juga berdampak pada peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum dalam masyarakat UMKM secara luas. Dengan melibatkan pelaku UMKM dalam proses pendampingan, masyarakat Desa Puraseda dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif pada bisnis mereka sendiri dan masyarakat sekitarnya. Melalui pendekatan partisipatif seperti ini, UMKM dapat belajar dan saling berbagi pengetahuan serta pengalaman, sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum dalam komunitas.

Pendampingan pendaftaran Badan Hukum Perorangan juga dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan. Mahasiswa dan dosen hukum tidak hanya memberikan bantuan dalam proses pendaftaran, tetapi juga memberikan dukungan pasca-pendaftaran. Seluruh tim dapat membantu UMKM dalam memahami tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi setelah memiliki badan hukum, seperti pelaporan keuangan secara berkala,



Gambar 3. Hasil Pendaftaran Badan Hukum Perorangan

Selain itu, mahasiswa dan dosen hukum juga memberikan arahan tentang prosedur yang harus diikuti dalam proses pendaftaran Badan Hukum Perorangan. Mereka membantu UMKM dalam memahami tahapan pendaftaran, mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan akta pendirian. Pendampingan ini bertujuan untuk mempercepat proses pendaftaran dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administratif.

Selain memberikan bantuan praktis dalam proses pendaftaran, pendampingan Badan Hukum Perorangan juga mencakup edukasi tentang manfaat memiliki badan hukum yang resmi bagi UMKM. Dengan memiliki Badan Hukum Perorangan, UMKM dapat memperoleh kepastian hukum, melindungi aset dan kekayaan, serta memperluas peluang kerjasama dan akses ke pembiayaan (Kara, 2013). Mahasiswa dan dosen hukum dalam LSVP memberikan pemahaman kepada UMKM mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh badan hukum, seperti pemisahan aset pribadi dan bisnis, tanggung jawab terbatas, serta perlindungan terhadap tuntutan hukum.

Selain itu, pendampingan Badan Hukum Perorangan juga mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh UMKM setelah memiliki badan hukum. Mahasiswa dan dosen hukum memberikan pemahaman tentang kewajiban pelaporan keuangan, pajak, dan peraturan lainnya yang berlaku bagi badan hukum. Dalam hal ini, pendampingan bertujuan untuk membantu

pemenuhan kewajiban pajak, dan pengaturan perjanjian kerjasama.

Terakhir untuk memastikan keberlanjutan dari hasil pengabdian yang sudah diberikan tim pengabdian kepada mitra sasaran, dibutuhkan monitoring dan evaluasi. Monitoring dalam hal ini dengan melakukan kunjungan ke lokasi secara berkala dan menjaga hubungan melalui group *whatsapp* bersama UMKM yang menjadi mitra sasaran. Evaluasi dilakukan secara simultan dengan melihat neraca penjualan dari mitra sasaran apakah meningkat atau tidak disetiap bulannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam Law Student Village Project (LSVP), pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Badan Hukum Perorangan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberdayaan hukum dan meningkatkan kesuksesan UMKM. Melalui pendekatan Case Based Participatory Research (CBPR), mahasiswa dan dosen hukum bekerja sama dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah hukum yang dihadapi oleh UMKM. Pendampingan ini mencakup penjelasan persyaratan, bantuan dalam pengisian formulir, pemahaman prosedur, kerjasama dengan pihak terkait, edukasi tentang manfaat, serta pendampingan dalam proses administratif dan pendaftaran.

Pendampingan pendaftaran NIB memberikan manfaat signifikan bagi UMKM. Dengan memiliki NIB, UMKM dapat menjalankan bisnis secara legal dan mendapatkan akses ke berbagai fasilitas dan dukungan dari pemerintah, seperti pelatihan, pembiayaan, dan peluang kerjasama dengan perusahaan lain. Selain itu, pendampingan ini juga membantu UMKM menghindari kesalahan administratif dan mengatasi hambatan birokrasi yang seringkali menjadi kendala dalam pendaftaran NIB. Pendampingan pendaftaran Badan Hukum Perorangan juga memiliki dampak positif yang signifikan bagi UMKM. Dengan menjadi badan hukum perorangan, UMKM dapat memperoleh kepercayaan dan kepastian hukum dari mitra bisnis, nasabah, dan investor. Pendampingan ini meliputi penjelasan mengenai prosedur pendirian dan pendaftaran, bantuan dalam pengumpulan dokumen, serta pemahaman tentang aspek hukum dan perpajakan yang terkait. Melalui pendampingan ini, UMKM dapat mempercepat proses pendirian badan hukum perorangan dan meminimalisir kesalahan yang berpotensi menghambat kesuksesan bisnis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Desa Puraseda, dan instansi terkait atas dukungan, kerjasama, dan kesediaan mereka dalam Law Student Village Project (LSVP). Kami mengapresiasi bimbingan, pengetahuan, dan pengalaman yang diberikan oleh Fakultas Hukum serta dedikasi tim Badan Eksekutif Mahasiswa dalam membantu kami dalam melaksanakan proyek ini. Kami juga berterima kasih kepada masyarakat Desa Puraseda atas partisipasi aktif dan kerjasama mereka dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah hukum yang dihadapi oleh UMKM. Terima kasih juga kepada instansi terkait yang telah bekerja sama dengan kami dalam pendampingan pendaftaran NIB dan Badan Hukum Perorangan bagi UMKM. Kami berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang lebih luas dalam meningkatkan kesuksesan dan pemberdayaan hukum bagi UMKM.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, C. (2022). Pemberdayaan Umkm Dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui Oss Di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 406–413. <https://doi.org/https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.487>
- Balasubramanian, P. (2022). *Organizational Resilience Strategies Alignment to MSME Owner's Long-Term Outcomes: A Qualitative Multiple Case Study*. Northcentral University.
- Collins, S. E., Clifasefi, S. L., Stanton, J., Straits, K. J. E., Gil-Kashiwabara, E., Rodriguez Espinosa, P., Nicasio, A. V., Andrasik, M. P., Hawes, S. M., & Miller, K. A. (2018). Community-based participatory research (CBPR): Towards equitable involvement of community in psychology research. *American Psychologist*, 73(7), 884. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/amp0000167>
- Cornwall, A., & Jewkes, R. (1995). What is participatory research? *Social Science & Medicine*, 41(12), 1667–1676.
- Dirkareshza, R., Azura, D. M., & Pradana, R. (2021). Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat. *Jurnal Mercatoria*, 14(1), 46–55.
- Dirkareshza, R., Tarina, D. D. Y., Simbolon, K., & Agustanti, R. D. (2021). Pendampingan

- masyarakat mengenai dampak hukum penolakan vaksinasi di masa pandemi COVID-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(5), 2812–2823.
- Dwi Safitri, A., Rani, M., & Irman, I. (2023). Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga). Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Gu, W., Moustafa, A., Ito, T., Zhang, M., & Yang, C. (2021). A Case-based Reasoning Approach for Supporting Facilitation in Online Discussions. *Group Decision and Negotiation*, 30. <https://doi.org/10.1007/s10726-021-09731-4>
- Harahap, Y. D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, 14(2), 725–738.
- Hidayah, N., Mustoffa, A. F., Silfia, A., & Nurdiyawati, E. F. (2023). Optimalisasi Dosen Dalam Pendampingan Pengurusan Nib Sebagai Upaya Mensukseskan Program Pemerintah Tentang Perizinan Pada Amal Usaha Aisiyah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 3(2), 150–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v3i2.469>
- Israel, B. A., Schulz, A. J., Parker, E. A., Becker, A. B., Allen, A. J., Guzman, J. R., & Lichtenstein, R. (2017). Critical issues in developing and following CBPR principles. *Community-Based Participatory Research for Health: Advancing Social and Health Equity*, 3, 32–35.
- Jap, Y. P. (2018). Kepatuhan pajak, norma sosial masyarakat, penegakan hukum, dan moral pajak perusahaan Agro pada bursa efek di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 137–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmie.v2i1.1705>
- Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.9744/jmk.8.1.pp.%201-9>
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 47(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/ajish.2013.47.1.%25p>
- Mabetha, D., Ojewola, T., Van Der Merwe, M., Mabika, R., Goosen, G., Sigudla, J., Hove, J., Witter, S., & D'Ambruoso, L. (2023). Realising radical potential: building community power in primary health care through Participatory Action Research. *International Journal for Equity in Health*, 22(1), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12939-023-01894-7>
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Melina, M., & Taufiqurahman, F. (2022). Perlindungan Hukum Atas Pemberian Lisensi Di Tanjung Pinang Franchise. *Ensiklopedia of Journal*, 4(2), 70–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v4i2.1027>
- Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. S. (2023). Pentingnya legalitas usaha dan sosialisasi pembuatan NIB bagi pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 807–811. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>
- Safitri, I. (2020). *Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan UMKM di Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19*.
- Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 615–630.
- Ward, M., Schulz, A. J., Israel, B. A., Rice, K., Martenies, S. E., & Markarian, E. (2018). A conceptual framework for evaluating health equity promotion within community-based participatory research partnerships. *Evaluation and Program Planning*, 70, 25–34.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Lembaran Negara Nomor 5953)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Nomor Induk Berusaha.